



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Pos Satelit News
 (lainnya)

Hari/Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023

Halaman Koran : 5



27 Pimpinan BP Presentasi Keterbukaan Informasi

SERANG, BANPOS - Pada tahapan presentasi yang dilaksanakan secara virtual, untuk kategori perangkat daerah Provinsi Banten, 27 pimpinan perangkat daerah memaparkan secara langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi. Demikian yang didapatkan dalam proses monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten bagi Badan Publik (BP) di Provinsi Banten yang terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi Banten, kabupaten kota, BUMD, Lembaga Vertikal dan Partai Politik di Provinsi Banten. Tahapan monev terdiri dari sosialisasi kepada Badan Publik, pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik, verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi, presentasi oleh Badan Publik dan penilaian oleh Komisi Informasi. Pada monev tahun 2023,

Komisi Informasi menerapkan e-monev pada tahapan pengisian lembar evaluasi diri (SAQ) Diketahui, terdapat 7 perangkat daerah yang melakukan presentasi oleh Sekretaris yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) oleh setingkat eselon tiga. Kemudian, 3 perangkat daerah lainnya dipaparkan oleh fungsional yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pariwisata (Dispar). Pada Badan Publik

kabupaten kota, 6 Bupati dan Walikota memaparkan langsung presentasi keterbukaan informasi publik sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dipaparkan oleh Wakil Bupati. Wakil Ketua Komisi Informasi Banten, yang juga sebagai ketua Pelaksana Monev 2023, Hilman mengatakan bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2023. "Tahapan monev akan dilanjutkan dengan visitasi ke badan publik yang telah memberikan paparan monev. Dimana badan publik akan divisitasi oleh 5 tim monev yang dibentuk oleh komisi informasi provinsi Banten," ujarnya, Minggu (1/10). Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Toni Anwar Mahmud mengatakan bahwa monev Badan Publik bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik. "Dalam pelaksanaan keterbukaan

Informasi Publik, dimana setiap I wajib untuk menyediakan, menbitkan/mengumumkan dan memberikan layanan informasi publik mengidentifikasi, menginventarisasi memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik serta menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik," katanya. Toni berharap bahwa monev yang dilaksanakan Komisi Informasi dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Semoga bisa meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas," ta," tandasnya. (CR-01/AZM)